

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM *AL-QUR'AN* DAN *TAFSIRNYA*  
KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA RI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam (S. Th. I.)**

Oleh:  
**AAT HIDAYAT**  
NIM 02531027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**JURUSAN TAFSIR DAN HADIS  
FAKULTAS USHULUDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

**Drs. M. Yusuf, M.Si.**  
**Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA**  
**Dosen Fakultas Ushuluddin**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Aat Hidayat  
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Aat Hidayat  
NIM : 02531027  
Jurusan : Tafsir dan Hadis  
Judul Skripsi : Prinsip-prinsip Demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim Departemen Agama RI

Maka kami sebagai pembimbing I dan pembimbing II berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat diujikan di depan Sidang Munaqasyah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Theologi Islam (S. Th. I.) dalam Ilmu Tafsir dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

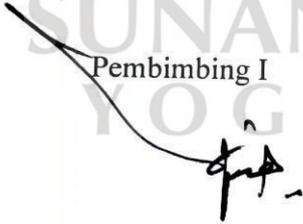
Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 September 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. M. Yusuf, M.Si.  
NIP. 150 241 786

  
Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA  
NIP. 150 282 515

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aat Hidayat  
NIM : 02531027  
Fakultas : Ushuluddin  
Jurusan/Prodi : Tafsir dan Hadis  
Alamat Rumah : Dukuhbadag RT 10 RW 02 Cibingbin Kuningan Jawa Barat 45587  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Wates Km. 9 Komplek Jati Sawit Asri Blok B I No. 1 Balecatur Gamping Sleman Yogyakarta  
Judul Skripsi : Prinsip-prinsip Demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim Departemen Agama RI

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 September 2008

Saya yang menyatakan,



Aat Hidayat



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1857/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Prinsip-prinsip Demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Karya Tim Departemen Agama RI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

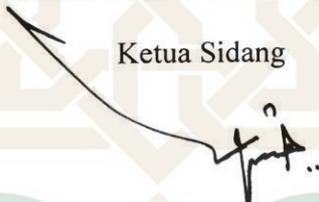
Nama : Aat Hidayat  
NIM : 02531027

Telah dimunaqosyahkan pada : Kamis, 25 September 2008  
Dengan nilai : 96 / A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

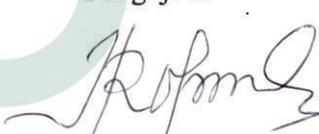
Ketua Sidang

  
Drs. M. Yusuf, M.Si.  
NIP. 150 241 786

Penguji I

Penguji II

  
Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.  
NIP. 150 289 435

  
Inayah Rohmaniyah, M.Hum., MA  
NIP. 150 282 515

Yogyakarta, 25 September 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin

DEKAN



  
Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.  
NIP. 150 232 692

## PERSEMBAHAN



Tulisan sederhana ini kupersembahkan untuk:

*Mamah & Bapa*

*Desahan nafasmu adalah doa, dan hidupmu adalah inspirasi tiada henti.  
Terima kasih atas jerih payahmu.*

*Ning Nisa'*

*Doa dan harapanmu adalah suluh pengobar semangatku untuk selalu tabah  
dalam menyongsong matahari. Terima kasih atas kasih sayangmu.*

*Para Pencari Kebenaran*

*Pengembara ilmu yang jiwanya selalu resah,  
yang selalu menjaga kobaran api semangat di dalam dada.  
Mari kita goncangkan dunia ini dengan ilmu dan amal.*

## MOTTO

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

*Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.*

(Q.S. Yūsuf [12]: 76)<sup>1</sup>

*Hanya orang yang terus berusaha  
yang akan menikmati hasil jerih payahnya.*

(Mohammad Hatta)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1993).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآلَةِ الْإِلَهَةِ الْمَالِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينِ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ حَيِّينَا الْمُخْتَارِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur hanya bagi Allah swt., Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dialah penguasa dan pengatur jagad raya ini. Hanya kepada-Nya kita bersimpuh dalam kekhusyukan ibadah dan hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan.

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., yang telah berjuang dengan segala daya dan upaya dalam mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju masa depan cemerlang.

Alhamdulillah, setelah melewati berbagai perjuangan yang penuh onak dan duri, diwarnai dengan cucuran air mata, leleran keringat, suka dan duka, bahkan pengkhianatan, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Tafsir dan Hadis Bapak Dr. Suryadi, M.Ag. serta Sekretaris Jurusan Tafsir dan Hadis Bapak M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag.
4. Bapak Ahmad Baidlawi, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik. Beliau telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengarungi liku-liku selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Yusuf, M.Si. dan Ibu Inayah Rohmaniyah, M.Hum. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau berdua telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis.

Beliau berdua juga selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Atas segala jasa beliau berdua lah penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama dosen-dosen Jurusan Tafsir dan Hadis. Beliau semua sudah banyak mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis, membimbing, dan membina penulis supaya menjadi manusia terpelajar dan berbudaya.
7. Terima kasih dan sembah sujud penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Mamah dan Bapa. Beliau berdua telah banyak mencurahkan doa, dorongan moril, dan sentuhan spiritual kepada penulis, sejak penulis pergi meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu dan menuai pengalaman sampai penulis dapat menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa kakak-kakak penulis: A' Ono, Teh Iin, Teh Uun, dan adikku tersayang Neng Mila. Mereka banyak memberikan semangat dan doa demi kesuksesan penulis.
8. Terima kasih dan sembah bakti penulis sampaikan kepada Abah dan Ibu. Beliau berdua selalu mendoakan penulis dan menumbuhkan harapan penulis. Tidak lupa, De Niha dan De Nurul yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Teman-teman TH angkatan 2002 yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka kala mengarungi studi di Kota Gudeg ini: Didik, Azis, Busri, Abu, Cholish, Hayat, Fuad (Kamu memang seorang teman yang baik. Akan tetapi, perbuatanmu membajak motto dan kata pengantar skripsiku adalah sebuah pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan! Maaf jika akhirnya saya memendam dendam!), Dayat, Rully, Lela, Lina, Titi, Robithoh, Uswah, Arifah, Umi Ashim, Ula, Nafiati, Hukam, Lutfi, Fatah, Umi, Wahyuningsih, Aina, Mursyidi, Ma'ruf, Mahmudin, Mujib, Ruslan, Saeful, Ismail, Si Mbah Toha, Kholib, Rusydie Sang Seniman, Sabiq, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Rawatlah bara intelektual kalian!
10. Teman-teman IKADA Cabang Yogyakarta, khususnya angkatan 2002: Ijar, Kholid, Abah, Eboy, Fuad Borju, Ihsan Bulu, Titin, Aniatun, Adeng, Kojek

Fatah, dan Nova. Tidak lupa, Kang Afifi, Kang Eful, Kang Deden, Mang Abud, Mang Encun, Kang Dudu, Kang Gus Dur, Kang Ade, Teh Hani, Teh Mala, dan Teh Hesti. Jaga persahabatan dan persaudaraan kita ya!

11. Teman-teman organisasi, baik di Kelompok Diskusi Athena Institute, Lembaga Pers Mahasiswa *ARENA*, KAMMI UIN Sunan Kalijaga, BEM-J Tafsir dan Hadis, maupun di *Sunan Kalijaga News*. Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, dan semuanya. Berkat kalian semua, akhirnya penulis bisa memahami dan memaknai perjalanan hidup ini.
12. Teman-teman KKN di Gayam, Delingo, Bantul: Arifin, Majid, Heru, Kang Arif, Mimin, Unes, dan Isnur. Ingatlah kebersamaan kita!
13. Teman-teman seperjuangan di Pesantren Masyarakat Siti Khodijah Yogyakarta: Topik, Heru, Nasir, Harun, Ali, Salman, Salim, Joko, dan Sawaun. Kalian telah memberikan pelajaran berharga kepada penulis tentang arti penting pengabdian kepada masyarakat. Teruslah berjuang, Kawan!
14. Teman-teman kos Wisma Al-Kindy Krapyak Yogyakarta: Ibenk, Aris Fahmi, Bang Fahrul, Bang Fahmi, Mas Heru, Mas Joko, Mas Sarto, Bang Paijo, Ali Jihad, Azib, Ali Pati, Gus Dur, Mas Budi, Mas Arif Kunci, Mas Anto, Wawan Sabur, Asas, Hamim, Maryanto Blacky, Komeng, Udin, Wawan Guno, Ucheng, Agus Jambi, Agus Tegal, Arwan, Teguh, Casmin, Nurdin, Irfan, dan yang lainnya, termasuk Si Mbah penjual nasi. Terima kasih atas semuanya. Banyolan dan bahkan ejekan kalian menjadi hiburan bagi penulis kala sedang penat dengan setumpuk masalah.
15. Teman-teman di Penerbit Insan Madani Yogyakarta: Reza, Ayu, Mas Fauzul, Mas Alek, Mas Oong, Mas Basit, Mas Zaid, dan Mas Iqbal. Tidak lupa, Mas Mahfud, Mas Danu, Hani, Mbak Ratna, Yani, Mas Nunung, Si Mbah Simon, Mas Fatkhan, Mas Imam, Tyo, Indra, Erwin, Lungit, Mas Topik Artistik, Topik Teks, Sentot, Muklis, Mbak Isna, Mas Zuhri, Mas Wahyu, Mas Dodo, Mas Nugroho, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas sikap kekeluargaan dan beragam pengetahuan yang telah kalian berikan. Sungguh, kebersamaan kita selama ini telah memberikan petualangan yang sangat berharga bagi penulis. Semangat, kreatif, dan teruslah berkarya!

16. Teristimewa buat Ning Nisa', yang selalu menyemangati, menemani, menghibur, mendoakan, serta membangunkan penulis untuk salat malam dan nulis skripsi. Walaupun kebersamaan kita dipisahkan oleh jarak antara dua kota, tetapi itu semua sanggup menjadi embun penyejuk bagi penulis. Berkat perhatian dan kasih sayangnyalah penulis bisa tetap bertahan dan masih memiliki semangat untuk melanjutkan hidup ini.

Atas segala bantuan, sokongan, perhatian, dan doa mereka, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Allah swt. memberikan balasan kepada mereka, lebih besar daripada pengorbanan yang sudah mereka berikan kepada penulis selama ini. Terakhir, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah tafsir di Indonesia.

Yogyakarta, 10 September 2008

Aat Hidayat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	ka-ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah (Ditulis Rangkap)**

متعددة عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'Iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

**C. Ta' marbutah di Akhir Kata**

1. Transliterasi *ta' marbutah* bila mati ditulis "h"

حكمة علة	Ditulis Ditulis	<i>Ḥikmah</i> <i>'Illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat dan zakat, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Transliterasi *ta' marbutah* bila hidup ditulis "t"

المدينة المنورة زكاة الفطر	Ditulis Ditulis	<i>al-Madīnatul Mumawwarah</i> <i>Zakātul Fiṭri</i>
-------------------------------	--------------------	--

3. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء زكاة الفطر	Ditulis Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i> <i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------------------------	--------------------	--

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis Ditulis	<i>a</i> <i>Fa’ala</i>
نكر	kasrah	Ditulis Ditulis	<i>i</i> <i>Ḥukira</i>
يذهب	dammah	Ditulis Ditulis	<i>u</i> <i>Yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>ay</i> <i>Baynakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>aw</i> <i>Qawl</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعددت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**I. Penulisan Huruf Kapital**

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

وما محمد إلا رسول	Ditulis	<i>Wa mā Muhammadun</i>
أبو الحسين	Ditulis	<i>illā Rasūl</i> <i>Abū al-Ḥusain</i>

**J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-Sunnah</i>

## ABSTRAK

*Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI adalah sebuah tafsir yang cukup unik. Selain disusun oleh sekelompok intelektual akademis yang memiliki pandangan beragam, tafsir ini juga digagas oleh pemerintah Orde Baru pimpinan Soeharto. Tujuan tafsir ini adalah menggali nilai-nilai agama sebagai modal untuk menciptakan masyarakat *sosialistis-religius* sebagaimana tertuang dalam Pancasila. Untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang maju, Soeharto juga mendasarkannya pada Demokrasi Pancasila. Di lain pihak, wacana demokrasi masih mendapat pertentangan keras dari beberapa intelektual Muslim. Sejauh mana Tafsir Depag mengelaborasi wacana demokrasi dalam penafsirannya, bagaimana peran pemerintah dalam memengaruhi konstruksi wacana demokrasi Tafsir Depag, serta bagaimana arah dan gerak Tafsir Depag di hadapan penguasa? Penelusuran terhadap permasalahan tersebut bertumpu pada beberapa nilai demokrasi, yakni keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*).

Kajian ini bersifat *library research* yang didasarkan pada *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI sebagai sumber data primer serta *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* karya Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru" karya Indal Abror dalam *ESENSIA* Vol. 4, No. 1, Januari 2003, dan beberapa karya terkait sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Adapun untuk mengolah data digunakan metode analisis wacana model Teun A. van Dijk yang diletakkan dalam kerangka pendekatan hermeneutis.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketika menafsirkan beberapa ayat yang menjadi landasan prinsip-prinsip demokrasi, Tafsir Depag tidak sedikit pun menyebutkan istilah demokrasi. Tafsir Depag hanya menjelaskan gagasan utama prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menggambarkan demokrasi, Tafsir Depag berkesimpulan bahwa keadilan, persamaan, kebebasan, musyawarah, dan pertanggungjawaban harus diletakkan dalam kerangka melaksanakan amanat dengan baik, memberikan persaksian dengan jujur, tidak ada perbedaan di antara manusia, kebebasan dalam memeluk agama dan berbuat sekehendak hati, musyawarah dalam segala urusan dan dalam menyelesaikan suatu masalah, serta pertanggungjawaban dalam hal pengelolaan harta anak yatim dan komitmen terhadap janji. Pandangan Tafsir Depag terhadap beberapa prinsip demokrasi ini memiliki relasi dengan pemerintah Orde Baru sebagai penggagas tafsir. Implikasinya, ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi, Tafsir Depag cenderung *text oriented*, tidak ada upaya kontekstualisasi atau pem-  
"bumi"-an terhadap kondisi sosio-historis pembacanya. Maka, Tafsir Depag adalah karya tafsir yang bersikap diam di tengah penindasan wacana terselubung yang dilakukan oleh penguasa ketika tafsir ini muncul.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Metode Penelitian .....	20
F. Kerangka Teori .....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II SEJARAH DEMOKRASI DAN SETTING HISTORIS AL- QUR'AN DAN TAFSIRNYA KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA RI</b> .....	33
A. Demokrasi dalam Lintasan Sejarah .....	33
1. Awal Mula Munculnya Gagasan Demokrasi .....	33
2. Praktik Demokrasi di Dunia Islam .....	40
3. Demokratisasi di Indonesia .....	45
4. Demokrasi dalam Pandangan Intelektual Muslim .....	52

B. Sekilas <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i> Karya Tim Departemen Agama RI .....	57
1. Pemerintah Orde Baru dan Beberapa Kebijakannya dalam Kehidupan Keagamaan Bangsa Indonesia .....	57
2. Latar Belakang dan Sejarah Penulisan Tafsir .....	62

**BAB III TIM PENULIS TAFSIR, METODOLOGI PENAFSIRAN, DAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA* KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA RI .....**

A. Aktor Intelektual di Balik Penulisan Tafsir, Metodologi Penafsiran, dan Contoh Penafsiran .....	67
1. Tim Penulis Tafsir .....	67
2. Metodologi dan Corak Penafsiran .....	70
3. Contoh Penafsiran .....	73
B. Prinsip-prinsip Demokrasi .....	75
C. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam <i>Al-Qur'an dan Tafsirnya</i> Karya Tim Departemen Agama RI .....	77
1. Keadilan ( <i>al-'Adālah, Justice</i> ) .....	77
2. Persamaan ( <i>al-Musāwah, Egalitarianism</i> ) .....	85
3. Kemerdekaan ( <i>al-Hurriyyah, Freedom</i> ) .....	88
4. Musyawarah ( <i>al-Syūrā, Consultation</i> ) .....	94
5. Pertanggungjawaban ( <i>al-Mas'ūliyyah, Accountability</i> ) .....	97

**BAB IV ANALISIS ATAS PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM *AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA* KARYA TIM DEPARTEMEN AGAMA RI .....**

A. Analisis Struktur Teks: Mengurai Benang Penafsiran .....	105
B. Analisis Kognisi Sosial: Melihat Dimensi Kekuasaan dalam Proses Produksi Makna .....	128
C. Analisis Sosial: Menelaah Arah dan Gerak Tafsir .....	134

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>139</b>
	A. Kesimpulan .....	139
	B. Saran-saran .....	141

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual Muslim adalah demokrasi. Wacana ini muncul pertama kali pada abad ke-5 M sebagai respons atas pengalaman buruk monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno. Namun, ide-ide demokrasi modern baru berkembang pada abad ke-16 M. Selanjutnya, ketika Barat bangkit dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan militer, mereka berusaha memaksakan hasil peradaban mereka kepada negara-negara jajahannya, termasuk negara-negara Islam. Salah satu hasil peradaban Barat tersebut adalah demokrasi.<sup>1</sup>

Sebenarnya, wacana demokrasi lahir sebagai akibat dari berkembangnya modernisme. Sebagai sebuah gerakan, modernisme muncul pertama kali di Eropa yang ditandai oleh hilangnya lembaga-lembaga politik warisan Abad Pertengahan. Dengan berintikan pada pandangan dunia, *weltanschauung*, gerakan ini berorientasi pada kemajuan dan berupaya agar bisa keluar dari era kegelapan Abad Pertengahan. Dari gerakan ini, lahirlah pemikiran-pemikiran baru, seperti sistem ekonomi kapitalis, konsep negara bangsa, sekularisme, imperialisme-kolonialisme, nasionalisme, dan kedaulatan rakyat, termasuk demokrasi.<sup>2</sup>

Kontroversi di seputar demokrasi bermula dari perdebatan kalangan intelektual Muslim terhadap gerakan modernisme dalam Islam. Menurut Fazlur

---

<sup>1</sup>M. Nur Kholis Setiawan, *Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008), hlm. 23-24.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 22-23.

Rahman, perkembangan modernisme dalam Islam dimulai sejak abad ke-19 M, di mana kalangan modernis Islam memandang reformasi Islam sebagai suatu upaya yang komprehensif untuk mengangkat Islam dari lembah kemunduran. Reformasi tersebut berkaitan dengan isu-isu hukum masyarakat, politik, intelektual, moral, dan spiritual.<sup>3</sup> Namun, semangat modernisme Islam tersebut banyak mendapat reaksi dari kalangan intelektual Muslim, khususnya dari kubu fundamentalis. Salah satunya adalah Maryam Jameelah dan Abdul Qadir al-Sufi. Keduanya berpendapat bahwa kaum modernis adalah golongan yang ingin membaratkan dan menyekulerkan Islam.<sup>4</sup>

Demokrasi sebagai anak kandung modernisme, juga mendapat reaksi pro dan kontra di kalangan intelektual Muslim. Kontroversi di seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.<sup>5</sup>

Kontroversi tersebut mengundang perdebatan sengit di kalangan intelektual Muslim. Perdebatan wacana antara Islam dan demokrasi sering dikaitkan dengan

<sup>3</sup>Fazlur Rahman, "Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternative", dalam *International Journal Middle East*, I, (1970), hlm. 317, seperti dikutip oleh Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamental* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), hlm. 16.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>5</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.

wacana Islam dan politik.<sup>6</sup> Perdebatan ini, sepanjang sejarah intelektual di dunia Islam, tidak pernah mengenal titik henti. Sebab, jika dilihat dari dasar nilai dan segi historisnya, Nabi Muhammad sebagai pemegang otoritas doktrin Islam tidak pernah merumuskan prinsip-prinsip pemerintahan atau politik Islam secara tegas.<sup>7</sup> Maka, wacana tentang politik Islam sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad umat Islam, dengan berpegang kepada seperangkat nilai etis Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok. *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini<sup>8</sup> menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme,

---

<sup>6</sup>Tentang wacana Islam dan politik atau Islam dan ketatanegaraan, Munawwir Sjadzali membaginya ke dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang lengkap. Di samping mengatur urusan ibadah, Islam juga mengatur masalah politik dan ketatanegaraan. Kelompok ini diwakili oleh Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, M. Rasyid Ridha, dan Abdul A'la al-Maududi. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, bukan untuk mendirikan negara atau memimpin pemerintahan. Kelompok ini memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Kelompok ini diwakili oleh Ali Abd al-Raziq dan Thaha Husein. *Ketiga*, kelompok yang menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem politik atau pemerintahan. Kelompok ini berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem politik, tetapi hanya terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara dan berpolitik. Kelompok ini diwakili oleh Mohammad Husein Haikal. Lihat Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004), hlm. 1-2. Pembahasan komprehensif tentang masalah Islam dan politik bisa ditelaah dalam Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati (Jakarta: Serambi, 2006), terutama Bab "Islam dan Barat: Abad Modernisme dan Abad Fundamentalisme", hlm. 501-622.

<sup>7</sup>Lebih lanjut Munawwir Sjadzali menegaskan bahwa ketika Nabi Muhammad wafat, beliau tidak memberikan petunjuk tentang bagaimana seharusnya umat Islam menentukan siapa pemimpin atau kepala negara mereka, tentang bagaimana mengatur hubungan kekuasaan antara kepala negara dan rakyat, tentang batasan kekuasaan dan masa jabatan kepala negara, dan sebagainya yang terkait dengan masalah politik atau pemerintahan. Lihat Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 233.

<sup>8</sup>Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Deliar Noer, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Aswab Mahasin, dan Abdurrahman Wahid.

yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi. Artinya, kehadiran Islam selalu memberikan pandangan moral yang benar bagi tindakan manusia. Islam merupakan sebuah totalitas sempurna yang menawarkan ajaran-ajaran yang dapat memecahkan semua masalah kehidupan. Kelompok ini ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupannya, termasuk dalam urusan politik ataupun demokrasi, pada ajaran Islam.<sup>9</sup>

*Kedua*, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, bahkan mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini<sup>10</sup> menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia Barat. Islam mempunyai konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep *syūrā*. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi Barat dengan konsep *syūrā*, walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.<sup>11</sup>

*Ketiga*, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka

<sup>9</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 7-8.

<sup>10</sup>Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh Muslim yang tergabung dalam Hizbut Tahrir, seperti Syaikh Ali Belhaj dan Abdul Qadim Zallum. Salah satu tokoh yang cukup vokal menentang demokrasi adalah Abdul A'la al-Maududi. Al-Maududi sangat menentang konsep kedaulatan rakyat ala demokrasi Barat. Demokrasi Barat mengajarkan bahwa kedaulatan mutlak ada di tangan rakyat. Padahal menurut al-Maududi, walaupun rakyat punya wewenang untuk menetapkan sebuah keputusan, tetapi keputusan tersebut tunduk di bawah kedaulatan Tuhan. Dalam istilah al-Maududi disebut *theo-democracy*. Lihat M. Amien Rais, "Kata Pengantar", dalam Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 23-24.

<sup>11</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 8-9.

tidak sepenuhnya menerima dan tidak sepenuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini<sup>12</sup> menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis (baca: *high cultur*) yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti prinsip *al-'adālah*, *al-musāwah*, dan *al-syūrā*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda.<sup>13</sup>

Implikasi dari semua perdebatan di seputar gagasan demokrasi tersebut melahirkan perbedaan konsep penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Perdebatan ini melahirkan dua kubu yang saling bertolak belakang, yakni kubu fundamentalis dan kubu modernis. Kubu fundamentalis, yang diwakili oleh Abul A'la al-Maududi, berpandangan bahwa hubungan antara Islam dan negara tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Al-Maududi berupaya menggali corak negara yang diinginkan al-Qur'an, Sunah Nabi, praktik Khulafaur Rasyidin, dan konvensi para ulama. Al-Maududi tidak melirik sedikit pun pada sistem kenegaraan yang berkembang di Barat. Sementara itu, kubu modernis terbagi menjadi dua golongan, yakni modernis sekuler dan modernis religius. Golongan modernis sekuler mencoba memisahkan antara Islam dan negara. Adapun golongan modernis religius, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Natsir, mencoba

---

<sup>12</sup>Intelektual Muslim yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Bachtiar Effendy, M. Amien Rais, dan Nurcholish Majdid.

<sup>13</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, hlm. 9-10. Lihat juga catatan kaki nomor 27 dalam buku ini.

mengintegrasikan Islam dan negara dengan mencontoh sistem kenegaraan yang berkembang di Barat, termasuk demokrasi di dalamnya.<sup>14</sup>

Mengintegrasikan Islam dan negara, dalam hal ini demokrasi, inilah yang menjadi esensi dari penelitian yang penulis lakukan. Titik penting penelitian ini adalah penelusuran lebih lanjut terhadap nilai-nilai normatif Islam yang menjadi landasan etis dalam penyelenggaraan negara, lebih khusus lagi dalam pelaksanaan demokrasi sebagai basis kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun demokrasi berasal dari peradaban Barat yang memiliki paradigma pemikiran yang berbeda dengan umat Islam, tetapi demokrasi memiliki nilai etis yang sama dengan Islam, seperti prinsip keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), dan musyawarah (*al-syūrā*). Pencarian landasan etis prinsip-prinsip demokrasi dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi inilah yang menjadi agenda penting bagi kalangan intelektual Muslim. Selanjutnya, landasan etis ini bisa dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya lewat saluran objektivikasi terlebih dahulu.<sup>15</sup>

Penelusuran sintesis antara Islam dan demokrasi dalam penelitian ini akan dilakukan terhadap *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI. Penelusuran ini akan dilihat melalui penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), dan musyawarah (*al-syūrā*).

<sup>14</sup>Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, hlm. 112.

<sup>15</sup>Objektivikasi adalah sebuah proses mengobjekkan norma Al-Qur'an ke dalam seperangkat aturan yang bisa digunakan tidak hanya oleh kalangan Muslim, tetapi oleh non-Muslim sekalipun. Dengan metode ini, beberapa norma Islam yang subjektif hanya untuk orang Islam menjadi objektif dan bisa digunakan oleh non-Muslim. Singkatnya, objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal Islam ke dalam kategori-kategori objektif. Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 64.

*Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu Proyek Pemerintah dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita) di Bidang Keagamaan.<sup>16</sup> Proyek ini mulai dilaksanakan pada tahun 1972. Sebagaimana diungkapkan Presiden Soeharto dalam sambutan atas terbitnya tafsir ini, bahwa upaya penerjemahan dan penafsiran Al-Qur'an bertujuan untuk menggali nilai-nilai agama sebagai modal dalam menciptakan masyarakat *sosialistis-religius* yang merupakan cita-cita negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sebagai falsafah negara.<sup>17</sup>

Selama penyelenggaraan proyek ini, dua Surat Keputusan telah mengawal operasionalisasinya. Di samping mengeluarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 90 Tahun 1972 tentang pembentukan Dewan Penyelenggara Penafsir Al-Qur'an, pemerintah juga mengeluarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 1980 untuk menyempurnakan SK sebelumnya dalam rangka mengganti anggota tim yang telah uzur dan meninggal dunia.<sup>18</sup>

Kalau melihat latar historis ketika tafsir ini disusun, yaitu tahun 1972, masa ini merupakan masa-masa penguatan struktur kekuasaan Orde Baru. Masa ini dimulai pada tahun 1970, ketika legitimasi “dwifungsi ABRI” di bidang

---

<sup>16</sup>Proyek ini di-back-up oleh Departemen Agama RI. Selain menerbitkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI juga menerbitkan *Mushaf Al-Qur'an*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, serta *Juz 'Amma dan Terjemahnya*. Lihat Departemen Agama RI, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1991), hlm. xiii.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. xi.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. xv.

pertahanan, keamanan, politik, dan sosial kemasyarakatan mulai dilakukan pemerintah.<sup>19</sup>

Di bidang politik misalnya, pemerintah melakukan upaya penyederhanaan partai politik peserta pemilu pada tahun 1973, yang pada waktu itu hanya ada tiga partai peserta pemilu saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan upaya ini, pemerintah lewat Golkar-nya, berhasil melakukan penguatan struktur kekuasaan dengan terencana dan halus.<sup>20</sup> Selain di bidang politik, masih banyak lagi upaya-upaya penguatan struktur pemerintah Orde Baru lainnya, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun di bidang keagamaan.

Dari latar belakang inilah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* menjadi objek kajian yang menarik. Sebab, selain ide penulisan Tafsir Depag berasal dari pemerintah Orde Baru sebagai bagian dari proyek pembangunan di bidang keagamaan, penyusunan tafsir ini pun dikendalikan langsung oleh sebuah institusi di bawah birokrasi negara, yakni Departemen Agama. Selain itu, faktor yang paling menarik dari Tafsir Depag adalah tujuan mulia di balik penyusunannya, yakni menggali nilai-nilai agama sebagai modal dalam menciptakan masyarakat *sosialistis-religius* yang merupakan cita-cita negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sebagai falsafah negara.

Di sinilah aspek penting penelitian ini, apalagi jika dikaitkan dengan tema demokrasi. Sebagai penegasan, sisi menarik dan penting dari penelitian ini adalah

---

<sup>19</sup>Dody S. Truna, "Islam dan Politik Orde Baru di Indonesia 1966-1990", dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (peny.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan* (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 199.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 201-202.

ketika mengorelasikan antara konstruk penafsiran yang dibangun oleh Tim Departemen Agama RI dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan upaya pemerintah Orde Baru dalam memperkokoh kekuasaannya. Tesis yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo di bawah ini bisa menjadi pendukung esensi penelitian ini.

Perjumpaan Islam—sebagai sebuah ideologi sosial yang menderivasikan teori dan paradigma liberatif-nya ke arah transformasi sosial yang egaliter, humanis, dan emansipatoris—dengan berbagai dimensi kepentingan sosial-kemasyarakatan, tatanan ekonomi, struktur kekuasaan, dan ideologi sosial-politik yang cenderung hegemonik seringkali menjadi persoalan yang cukup kompleks dan problematis.<sup>21</sup>

Dengan demikian, berbagai upaya untuk mengurai sekat-sekat kepentingan dan ideologis dalam sebuah karya tafsir menjadi suatu keharusan dalam rangka melihat genuinitas pesan moral Al-Qur'an. Sebab, kelahiran sebuah karya tafsir tidak bisa dilepaskan dari agregasi berbagai kepentingan yang berkait-berkelindan di dalamnya.

Selanjutnya, penelitian ini hanya akan difokuskan pada penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi. Pembahasan tentang demokrasi dalam tafsir ini hanya akan dibatasi pada beberapa prinsip inti dalam demokrasi; yaitu keadilan (*al-'adālah*), Q.S. al-Nisā' [4]: 58 dan 135, Q.S. al-Mā'idah [5]: 8; persamaan (*al-musāwah*), Q.S. al-Hujurat [49]: 13; kemerdekaan (*al-hurriyyah*), Q.S. al-Baqarah [2]: 256, Q.S. al-Taubah [9]: 105, Q.S. Yūnus [10]: 99; musyawarah (*al-syūrā*), Q.S. Āli 'Imrān [3]: 159, Q.S. al-

---

<sup>21</sup>Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), film. 337.

Syūrā [42]: 38; dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*), Q.S. al-Isrā' [17]: 34, Q.S. al-Aḥzāb [33]: 15.<sup>22</sup>

Dari sinilah penelitian ini akan diawali, untuk kemudian melihat bagaimana konstruk penafsiran yang dibangun oleh Tim Departemen Agama RI dalam tafsirnya ketika membicarakan prinsip-prinsip demokrasi, serta melacak keterkaitannya dengan kepentingan atau *hidden agend* yang diusung oleh pemerintah Orde Baru.

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana inti penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi?

<sup>22</sup>Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Katalis kerja sama dengan Republika, 2004), hlm. 80-103. Lihat juga Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 203-210. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi yang dirumuskan dalam dua karya ini akan dijadikan sebagai kerangka teori untuk melihat penafsirannya dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, dengan mengorelasikannya dengan beberapa pendapat dari intelektual lainnya. Di antaranya Nurcholish Madjid, Bachtiar Effendy, dan Abdurrahman Wahid. Lihat Nurcholish Madjid, "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", dalam Bernard Lewis, *et. al., Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 293-297; Bachtiar Effendy, "Islam, Demokrasi, dan HAM: Problema Doktrin dan Implementasi", dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 29; dan Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi", dalam Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.), *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LPSM, 1986), hlm. 89-90. Di samping itu, perlu diperhatikan juga rumusan Nahdlatul Ulama dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo Kediri Jawa Timur pada 21-27 November 1999, ketika membahas respons Islam terhadap demokrasi. Lihat Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Mubes, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasr NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama, 2005), hlm. 641.

2. Bagaimana relasi antara kekuasaan dan proses produksi makna dalam penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi?
3. Bagaimana arah dan gerak tafsir yang dianut oleh Tim Departemen Agama RI ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui inti penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.
2. Untuk melacak relasi antara kekuasaan dan proses produksi makna dalam penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.
3. Untuk mengungkap arah dan gerak tafsir yang dianut oleh Tim Departemen Agama RI ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan pandangan kepada para pengkaji Ilmu Tafsir bahwa kemunculan suatu produk tafsir tidak kosong dari pengaruh historis yang melatarbelakangi kelahiran produk tersebut. Pengaruh tersebut berupa tanggungan kepentingan dan ideologi tertentu yang diusung oleh para aktor intelektual di balik penulisan dan kelahiran sebuah karya.

2. Memberikan kontribusi pada khazanah Ilmu Tafsir dalam rangka pengembangan wilayah kajian tafsir Al-Qur'an di Indonesia, dengan menggunakan analisis wacana. Karena pada kenyataannya, kajian tafsir Al-Qur'an yang dilakukan selama ini hanya sebatas pengungkapan aspek luarnya saja, jarang yang mencoba menyentuh aspek dalam.<sup>23</sup>

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang menjadikan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI sebagai objek kajian bukanlah hal baru di dunia akademik di tanah air. Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian yang mencoba mengelaborasi tafsir ini.

Howard M. Federspiel, seorang profesor di Institut Studi-studi Islam Universitas McGill Montreal Kanada, yang juga sebagai profesor Ilmu Politik di Universitas Negara Bagian Ohio Amerika Serikat, dalam karyanya *Popular Indonesian Literature of the Qur'an*,<sup>24</sup> pernah mengkaji tafsir ini. Karena kajian yang dilakukan oleh Federspiel ini sangat luas, tidak hanya literatur tafsir saja, tetapi semua literatur yang berkaitan dengan Al-Qur'an secara umum, maka kajian yang dilakukannya tidak mendalam. Dalam penelitiannya terhadap tafsir karya Tim Departemen Agama RI, Federspiel menjelaskan bahwa tafsir ini merupakan bagian dari proyek Pemerintah Orde Baru di bawah koordinasi Departemen

<sup>23</sup>Aspek luar di sini maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan deskripsi makna dan elaborasi metodologi sebuah karya tafsir. Adapun aspek dalam maksudnya adalah hal yang berkaitan dengan *episteme* yang diusung oleh seorang mufasir lewat karya tafsirnya, atau lebih jauh lagi hal yang berkaitan dengan *episteme* atau sistem pengetahuan yang melingkupi kondisi historis seorang mufasir dan yang memengaruhi pola pikir seorang mufasir.

<sup>24</sup>Untuk edisi Indonesia, lihat *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996).

Agama dengan tujuan utama merencanakan dan menciptakan standar-standar dalam pembuatan tafsir dan terjemahan lebih lanjut.<sup>25</sup>

Selanjutnya, Federspiel juga berhasil menyajikan fakta bahwa dalam tafsir tersebut, ideologi kelompok "Muslim Nasionalis" sangat mewarnai penafsiran-penafsiran dalam buku tafsir ini.<sup>26</sup> Tetapi, argumentasi yang melatarbelakangi pendapat ini kurang begitu kuat, karena Federspiel hanya menyajikan satu contoh penafsiran saja. Di samping itu, Federspiel juga tidak begitu jelas menyebutkan, siapa yang dimaksud kelompok "Muslim Nasionalis".<sup>27</sup> Walau demikian, kajian ini berhasil memotret sisi politis dari kelahiran tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI. Selain penggagas utamanya adalah pemerintah Orde Baru di bawah Departemen Agama RI dan menjadi bagian dari rencana pembangunan pemerintah, sisi politis dari kelahiran tafsir *Al-Qur'an dan Tafsirnya* adalah pembuatan tafsir ini didanai oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Kajian serupa juga dilakukan oleh Islah Gusmian dalam *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*.<sup>29</sup> Berbeda dengan Federspiel, yang mengkaji *Al-Qur'an dan Tafsirnya* dari sisi politis, Gusmian lebih menitik-beratkan kajiannya pada wilayah metodologi penafsiran (sebagai aspek luar) dan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 143-144.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145.

<sup>27</sup> Penulis berasumsi bahwa yang dimaksud dengan "Muslim Nasionalis" adalah sekelompok bangsa Indonesia dari luar dan dari dalam pemerintah yang menjadi bagian dari tim penulis. Lihat *Ibid.*, hlm. 144. Sementara itu, Indal Abror menawarkan dua opsi dalam memaknai "Muslim Nasionalis". *Pertama*, semua penduduk Indonesia yang beragama Islam atau para aktivis organisasi keislaman. *Kedua*, Muslim nasionalis era 1900-1945 atau para anggota partai-partai Islam masa demokrasi liberal (Masyumi, NU, PSII, dan Perti). Lihat Indal Abror, "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru", dalam *ESENSIA*, Vol. 4, No. 1, Januari 2003, hlm. 25.

<sup>28</sup> Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an*, hlm. 152.

<sup>29</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003).

wilayah wacana serta kepentingan yang diusung di balik penulisan tafsir (sebagai aspek dalam).<sup>30</sup>

Dengan berbekal metode hermeneutika dan metode analisis wacana kritis, Gusmian berhasil menyingkap pelbagai kepentingan yang diusung oleh 24 karya tafsir di Indonesia dekade 1990-an, salah satunya adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI Edisi Revisi yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII). Gusmian berkesimpulan bahwa sebuah karya, tak terkecuali karya tafsir, bukanlah karya suci yang kedap kritik. Sebab, karya tafsir dengan pelbagai bentuknya mengusung pelbagai kepentingan.<sup>31</sup>

Walaupun Gusmian mengkaji tema “Tafsir di Tengah Rezim Orde Baru”, Gusmian tidak memasukkan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* di bawah tema ini. Tafsir ini justru dimasukkan ke dalam tema “Tafsir di Tengah Keragaman Agama”. Dari sisi ini, Gusmian berkesimpulan bahwa *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI sangat mendukung adanya kerjasama dengan non-Muslim. Walaupun demikian, dalam kerjasama dengan non-Muslim tersebut, tafsir karya Tim Departemen Agama RI ini memperingatkan sikap kehati-hatian.<sup>32</sup> Terkait dengan “Tafsir di Tengah Rezim Orde Baru”, Gusmian menyimpulkan bahwa karya tafsir pada era ini memiliki tiga kecenderungan; yang melawan dan mengkritik, yang bungkam, dan yang memuji.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 347.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 334-335.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 317-331.

Kajian yang secara lebih spesifik mengkaji ideologi tafsir Orde Baru dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI adalah yang dilakukan oleh Indal Abror dalam tulisannya berjudul "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru".<sup>34</sup> Dengan melakukan analisis historis terhadap karya tafsir ini dan analisis kebahasaan terhadap pemakaian istilah "Muslim Nasionalis", Indal Abror menjelaskan, anggapan Howard M. Federspiel yang menyatakan bahwa tafsir Al-Qur'an karya Tim Departemen Agama RI ini memuat pesan-pesan ideologis pemerintah Orde Baru lewat Muslim Nasionalis yang berada di dalam dan di luar sistem pemerintahan adalah analisis yang kurang tepat. Bahkan Indal Abror menekankan, justru munculnya tafsir ini menunjukkan andil pemerintah Orde Baru yang cukup berarti bagi umat Islam.<sup>35</sup>

Berikutnya adalah kajian yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab. Dalam tulisannya berjudul "Pengamatan Sekilas terhadap *Al-Qur'an dan Tafsirnya*",<sup>36</sup> M. Quraish Shihab mencoba meneliti secara lebih komprehensif tafsir karya Tim Departemen Agama RI. Penelitian yang dilakukan M. Quraish Shihab meliputi aspek riwayat yang digunakan, ketelitian bahasa, rujukan yang dipakai, dan aspek-aspek ilmiah yang dibahas dalam tafsir tersebut. Berdasarkan kajiannya, M. Quraish Shihab menyimpulkan bahwa karya tafsir ini cukup baik, walaupun ada beberapa kekurangan yang cukup mengganjal, seperti banyak pengulangan riwayat-riwayat untuk memperjelas penafsiran yang cenderung menimbulkan

---

<sup>34</sup>Indal Abror, "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru", hlm. 17-28.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

<sup>36</sup>M. Quraish Shihab, "Pengamatan Sekilas terhadap *Al-Qur'an dan Tafsirnya*", dalam M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 313-332.

ketidaklogisan penafsiran, terkadang penukilan riwayat tersebut tidak disertai dengan penjelasan dari mana sumbernya, ketidaktelitian dalam hal pengalihbahasaan atau penerjemahan ayat-ayat Al-Qur'an, dan ketidaktelitian dalam penggunaan rujukan.

Selanjutnya, karya yang cukup mewakili penelitian tentang persinggungan wacana antara Islam dan demokrasi adalah *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* karya Anas Urbaningrum.<sup>37</sup> Dalam penelitiannya, Urbaningrum melakukan penelusuran historis dengan melakukan analisis terhadap perkembangan pemikiran Nurcholish Madjid, terutama yang berkaitan dengan wacana demokrasi. Urbaningrum menyimpulkan bahwa pemikiran Nurcholish Madjid menunjukkan adanya persentuhan antara Islam dan konsep-konsep demokrasi. Menurut Urbaningrum, dengan melakukan analisis mendalam terhadap nilai-nilai normatif Islam dan sejarah Islam klasik, Nurcholish Madjid menyimpulkan bahwa sebenarnya ada persinggungan antara nilai-nilai Islam dan konsep-konsep demokrasi. Dengan konsep *Islamo-Demokrasi*-nya, Madjid menawarkan kehadiran Tuhan dalam demokrasi.

*Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* karya Idris Thaha<sup>38</sup> mencoba melihat persinggungan antara Islam dan demokrasi dalam bingkai pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais. Dengan melakukan analisis historis terhadap perkembangan demokratisasi di

---

<sup>37</sup>Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid* (Jakarta: Katalis kerja sama dengan Republika, 2004).

<sup>38</sup>Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais* (Jakarta: Teraju, 2005).

Indonesia, Thaha mencoba melihat keterkaitan Islam dan demokrasi dalam bingkai pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais.

Menurut Thaha, kedua tokoh ini mencoba mengenalkan kepada masyarakat Indonesia konsep demokrasi yang memiliki visi, mengandung tanggung jawab atas masa depan, dan menghargai serta memperjuangkan nilai-nilai agama. Demokrasi yang dimaksud kedua tokoh ini adalah demokrasi yang dilandaskan pada tauhid. Sebab tanpa tauhid, demokrasi tidak akan memiliki makna berarti bagi kehidupan masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan Demokrasi Religius.

Dalam buku *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terutama bab "Gagasan tentang Pemerintah Demokrasi Agama" serta "Toleransi dan Pemerintahan: Sebuah Wacana tentang Agama dan Demokrasi",<sup>39</sup> Abdul Karim Soroush mencoba mengenalkan konsep Demokrasi Agama. Menurut Soroush, demokrasi harus bisa mengelaborasi antara kepuasan Sang Khaliq dan kepuasan makhluk, yaitu dengan memadukan antara agama dan demokrasi, antara agama dan nalar. Inilah titik pangkal yang valid dan formulasi yang benar bagi problem perpaduan agama (baca: Islam) dan demokrasi.

Adapun buku yang berusaha menuntaskan perdebatan seputar Islam dan demokrasi adalah *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*.<sup>40</sup> Buku yang ditulis oleh Bernard Lewis,

---

<sup>39</sup>Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2002).

<sup>40</sup>Bernard Lewis, *et. al.*, *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry (Jakarta: Paramadina, 2002).

dkk.<sup>41</sup> ini mencoba menuntaskan perdebatan yang berkembang seputar Islam dan demokrasi. Lebih jauh, buku ini menawarkan gagasan-gagasan kritis dan cerdas dalam perspektif baru tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Kemudian, perdebatan wacana dalam buku ini diorientasikan menuju pemahaman komprehensif yang memungkinkan relasi positif antara Islam dan demokrasi dalam format ideal.

Penelitian yang cukup komprehensif dalam menelaah beberapa persinggungan makna antara Islam dan demokrasi, dalam bingkai intelektual Muslim Indonesia, adalah karya Masykuri Abdillah yang berjudul *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.<sup>42</sup> Masykuri Abdillah mencoba merangkum pandangan beberapa intelektual Muslim Indonesia, di antaranya M. Amien Rais, Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Ali Yafie, M. Dawam Rahardjo, dan M. Tahir Azhary,<sup>43</sup> terhadap demokrasi. Abdillah menyimpulkan bahwa sejumlah intelektual Muslim Indonesia tersebut mendukung konsep demokrasi, dengan dua alasan; *pertama*, nilai-nilai demokrasi sejalan dengan Islam,<sup>44</sup> dan *kedua*, sistem demokrasi merupakan cara yang tepat untuk mengartikulasikan aspirasi Islam.<sup>45</sup>

<sup>41</sup>Penulis lain yang ikut *urun-rembug* dalam buku ini di antaranya Hassan Hanafi, John L. Esposito, Robbert W. Hefner, Mohammed Abed al-Jabiri, Afan Gafar, dan Nurcholish Majdid.

<sup>42</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. x.

<sup>44</sup>Menurut intelektual Muslim Indonesia tersebut, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar tata politik yang sejalan dengan demokrasi, di antaranya *syūrā* (musyawarah), *al-'adālah* (keadilan), *al-musāwāh* (persamaan), dan *ukhuwwah* (persaudaraan). Lihat *Ibid.*, hlm. 307.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 307-308.

Kemudian, Abdul Mustaqim dalam tulisannya "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi",<sup>46</sup> mencoba mengelaborasi prinsip-prinsip dasar Islam dalam mengatur sistem pemerintahan Islam, lalu membandingkannya dengan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam demokrasi. Dengan melakukan penelusuran normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, yang kemudian dibandingkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, Mustaqim menyimpulkan bahwa ada beberapa prinsip dasar Islam yang kompatibel dan selaras dengan demokrasi. Tetapi, masalahnya terletak pada tataran implementasi dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dalam hal ini, Mustaqim berpendapat bahwa demokrasi bukan segala-galanya, karena demokrasi merupakan salah satu hasil ijtihad politik manusia yang sarat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Senada dengan Abdul Mustaqim, Khurshid Ahmad dalam "Islam and Demokrasi: Some Conceptual and Contemporary Dimensions"<sup>47</sup> juga mencoba membandingkan konsep demokrasi Barat dengan pilar-pilar normatif Islam yang mengatur pemerintahan. Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa walaupun demokrasi lahir dan berkembang dalam konteks peradaban Barat, tetapi selanjutnya konsep demokrasi berkembang dalam berbagai wajah, sesuai dengan konteks peradaban yang mengembangkannya. Dalam konteks peradaban Islam, konsep demokrasi berkembang dengan wajahnya tersendiri sesuai dengan moral

---

<sup>46</sup>Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Jurnal Studi Islam Profetika*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.

<sup>47</sup>Khurshid Ahmad, "Islam and Demokrasi: Some Conceptual and Contemporary Dimensions", dalam *The Muslim World*, Vol. 90, No. 1 & 2, Spring 2000.

Islam. Sebab secara normatif, Islam memberikan landasan moral dan landasan ideologi terhadap wacana demokrasi yang berasal dari Barat tersebut.

Itulah beberapa penelitian yang mencoba melihat keterkaitan wacana antara Islam dan demokrasi. Tentunya, semua penelitian yang telah dikemukakan di atas tidak bisa meng-*cover* keseluruhan wacana yang berkembang di seputar Islam dan demokrasi. Sebab, masih banyak penelitian serupa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu di sini.

Selanjutnya, penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh prinsip-prinsip demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI. Selain itu, penelitian ini juga akan menelusuri aspek wacana dan kepentingan yang diemban oleh para aktor intelektual di balik penulisan tafsir ini, yang memengaruhi konstruksi wacana demokrasi dalam tafsir tersebut. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek luar *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI ketika membicarakan prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini juga akan membongkar faktor-faktor historis (baca: aspek dalam) yang memengaruhi tafsir tersebut ketika menjelaskan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *library research*, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis, seperti

buku atau kitab yang berhubungan dengan topik pembahasan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas.<sup>48</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber kepustakaan; primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI.<sup>49</sup> Adapun data sekundernya adalah data dokumen tidak langsung yang menjelaskan data primer.<sup>50</sup>

Bahan penunjang ini bisa berupa karya-karya tentang khazanah tafsir Al-Qur'an di Indonesia—khususnya pada era Orde Baru—atau karya-karya lain tentang setting historis Islam di Indonesia pada era Orde Baru, baik berupa kitab, buku, ensiklopedi, maupun artikel di berbagai jurnal yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian ini. Misalnya, *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* karya Howard M. Federspiel, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi* karya Islah Gusmian, "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru" karya Indal Abror dalam *ESENSIA* Vol. 4, No. 1, Januari 2003, dan *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi* karya Masykuri Abdullah.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan), maka data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode

<sup>48</sup>Kartini, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1996), hlm. 33.

<sup>49</sup>Dalam penelitian ini akan menggunakan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI Edisi Revisi Tahun 1990, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia (UII).

<sup>50</sup>Kartini, *Pengantar*, hlm. 73.

dokumentasi. Metode ini diawali dengan pengumpulan beberapa referensi terkait dengan tema yang diangkat. Setelah data terkumpul, baru dilakukan penelaahan, pemilahan, dan pendokumentasian terhadap data-data yang terkait dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis wacana*. Analisis wacana biasa digunakan untuk membongkar teks media. Analisis yang memakai perspektif kritis ini—sehingga biasa disebut dengan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*)<sup>51</sup>—dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif apa yang mesti dipakai, dan topik apa yang dibicarakan.<sup>52</sup> Dalam analisis ini, bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan. Singkatnya, analisis ini tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa semata. Analisis ini juga selalu berhubungan dengan konteks di mana bahasa berada. Dalam arti, konteks ketika bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan.<sup>53</sup>

<sup>51</sup>Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 6-7.

<sup>52</sup>Alex Sobur menyebutkan beberapa karakteristik analisis wacana, di antaranya memfokuskan pada pesan tersembunyi (*latent*) dan memfokuskan pada pertanyaan *how*, bagaimana, dengan menganalisis struktur atau bangunan sebuah wacana. Lihat Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 70-71.

<sup>53</sup>Eriyanto, *Analisis*, hlm. 6-7.

Karena banyaknya model analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh para ahli,<sup>54</sup> maka perlu diambil salah satu model analisis wacana. Dari sekian banyak model analisis wacana, model yang paling banyak dipakai adalah model Teun A. van Dijk (1998). Kenapa model ini paling banyak dipakai? Alex Sobur menjelaskan, karena model ini berusaha mengelaborasi elemen-elemen wacana, sehingga bisa aplikatif secara praktis.<sup>55</sup>

Model analisis van Dijk ini biasa disebut model *kognisi sosial*. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks.<sup>56</sup> Fokus analisis ini diarahkan pada dua arti. Di satu sisi menunjukkan bagaimana proses teks tersebut ketika diproduksi oleh pemegang dan pengelola media, dan di sisi lain menggambarkan bagaimana nilai-nilai dominan yang ada di masyarakat tempat media eksis menyebar dan diserap oleh para pengelola media.<sup>57</sup>

Menurut van Dijk, wacana mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial.<sup>58</sup> Berdasarkan gagasan pokok inilah, van Dijk merumuskan kerangka analisis wacana yang bisa dipraktikkan untuk menganalisis sebuah teks media. Kerangka tersebut terdiri atas tiga tahap.

*Pertama*, analisis yang digunakan untuk meneliti struktur teks. Dalam struktur ini, van Dijk menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk

---

<sup>54</sup>Di antaranya model analisis wacana Roger Fowler, dkk. (1979), Theo van Leeuwen (1986), Sara Mills (1992), Norman Fairclough (1998), dan Teun A. van Dijk (1998). Lihat Alex Sobur, *Analisis Teks*, hlm. 73 dan Eriyanto, *Analisis*, hlm. 133-334.

<sup>55</sup>Alex Sobur, *Analisis Teks*, hlm. 73.

<sup>56</sup>Eriyanto, *Analisis*, hlm. 221.

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 222.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

menggambarkan atau mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. Metode yang biasa dipakai dalam struktur ini adalah metode kebahasaan, *critical linguistic*. Dengan metode analisis ini, akan diteliti bagaimana *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI menggunakan simbol-simbol bahasa dalam mendefinisikan prinsip-prinsip demokrasi melalui ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan. Penelitian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Tim Departemen Agama RI ini dilakukan dengan cara deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan untuk mendefinisikan prinsip-prinsip demokrasi.

*Kedua*, analisis pada struktur kognisi sosial, berusaha menganalisis bagaimana kognisi atau pola pikir pengelola media dalam memahami dan mendefinisikan seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Metode yang digunakan adalah metode wawancara mendalam dengan para pengelola media. Dalam penelitian ini, akan diteliti para aktor intelektual di balik penulisan *Al-Qur'an dan Tafsirnya*; setting historisnya, psikologinya, maupun paradigma berpikirnya (*mode of thought*), dengan cara penelusuran historis terhadap sejarah hidup para aktor intelektual di balik penulisan tafsir ini. Analisis pada tahap ini juga akan diperkaya dengan teori Michel Foucault tentang relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dimensi kekuasaan dalam proses produksi makna ketika Tim Departemen Agama RI menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi.

*Ketiga, analisis sosial (societal analysis), berusaha menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan. Metode yang dipakai adalah studi pustaka dan penelusuran sejarah. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana paradigma berpikir dan wacana yang berkembang di masyarakat ketika Al-Qur'an dan Tafsirnya muncul, dengan menelusuri peristiwa sejarah di mana tafsir ini muncul.<sup>59</sup> Titik tekan analisis pada tahap ini adalah menelaah arah dan gerak tafsir Al-Qur'an dan Tafsirnya ketika menafsirkan ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi. Dalam hal ini, analisis akan diperkaya dengan teori Islah Gusmian tentang arah dan gerak tafsir di tengah rezim Orde Baru.*

#### 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutis. Asumsinya, bahwa teks apa pun lahir dengan sejumlah pra-anggapan (*prejudice*) dan latar belakang yang dibawa oleh penulisnya. Oleh karena itu, setiap teks (penafsiran) perlu dicurigai mengandung kepentingan atau ideologi di balik penafsiran teks tersebut. Secara praktis, pendekatan hermeneutis tidak hanya memandang teks dan berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Pendekatan ini juga berusaha menggali makna teks dengan mempertimbangkan horison-horison yang melingkupi teks tersebut. Horison-horison ini mencakup horison teks, horison pengarang, dan horison pembaca. Dengan demikian, pendekatan ini tidak sekadar melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarang dan muatan apa yang ikut masuk ke dalam teks tersebut, tetapi juga berusaha melahirkan kembali

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 274-275.

makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dipahami. Intinya, pendekatan hermeneutis memerhatikan tiga hal sebagai komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan kontekstualisasi.<sup>60</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Demokrasi dan Prinsip-prinsipnya

Secara bahasa atau etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), yang berarti kekuasaan oleh rakyat atau pemerintahan rakyat.<sup>61</sup> Sementara itu, menurut Afan Ghafar, istilah demokrasi berasal dari kata *demokratia* yang mulai diperkenalkan pada masa klasik di Yunani Kuno. Istilah ini identik dengan intitusi pengambil keputusan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas para *demos* atau rakyat yang ada dalam *polis*.<sup>62</sup>

Adapun menurut istilah atau terminologi, demokrasi adalah bentuk pemerintahan, di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting, langsung ataupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa,<sup>63</sup> atau suatu pemerintahan mayoritas yang menerapkan sistem perwakilan, yang mengakui hak-hak individu dan mayoritas, yang terkait dengan hukum dan yang mengakui konsep *checks and balances*.<sup>64</sup>

<sup>60</sup>Fakhrudin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 11-12.

<sup>61</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 71.

<sup>62</sup>Afan Ghafar, "Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas", dalam Bernard Lewis, *et. al.*, *Islam Liberalisme Demokrasi*, hlm. 117.

<sup>63</sup>Sidney Hook, "Democracy", dalam *Encyclopaedia Americana*, Volume 8 (Danbury dan Connecticut: Grolier Incorporated, 1984), hlm. 683.

<sup>64</sup>Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 32.

Selanjutnya, dalam pandangan Abdul Mustaqim, demokrasi memiliki dua ranah, yaitu ranah realitas-pragmatis (*formal procedural*) dan ranah idealis-filosofis (*material substansial*).<sup>65</sup> Mengenai nilai-nilai normatif demokrasi atau demokrasi dalam ranah idealis-filosofis, Nurcholish Madjid menegaskan bahwa tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai *madania* dalam kehidupan sehari-hari.<sup>66</sup> Dengan kata lain, nilai-nilai normatif demokrasi merupakan perwujudan dari nilai-nilai *madania*, yang terdiri atas kesadaran akan kemajemukan atau pluralisme, menjunjung tinggi prinsip musyawarah, menentang monolitisme dan absolutisme, menjunjung tinggi akhlak mulia, permufakatan yang jujur dan sehat sebagai implikasi dari musyawarah yang jujur dan sehat, perwujudan kesejahteraan masyarakat, pengakuan akan kebebasan nurani serta persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia, di samping pentingnya pendidikan demokrasi dan upaya terus-menerus (*trial and error*) dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>67</sup>

Sementara itu, Muhammad Abed al-Jabiri berpendapat bahwa walaupun demokrasi memiliki akar historis yang berbeda dengan Islam, tetapi di sisi lain memiliki esensi yang paralel dengan konsep-konsep yang dapat dikembangkan

<sup>65</sup>Masykuri Abdillah, *Demokrasi*, hlm. 74-75.

<sup>66</sup>Nilai-nilai *madania* adalah nilai-nilai normatif yang menopang berdirinya masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban (*ber-madaniyah*), yaitu masyarakat yang tunduk dan patuh (*dāna yadīnu*) kepada ajaran kepatuhan (*dīn*), yang dinyatakan secara tegas dalam hukum dan peraturan. Lihat Nurcholish Madjid, "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", hlm. 281 dan 293.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 293-297.

dari tradisi Islam.<sup>68</sup> Di antara nilai-nilai dalam tradisi Islam yang memiliki kesamaan esensi dengan demokrasi adalah kebebasan, musyawarah, persamaan, dan keadilan.<sup>69</sup>

Dari dua pandangan intelektual Muslim ini, yakni Nurcholish Madjid dan Muhammad Abed al-Jabiri, pengertian demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas memiliki sandaran normatif di dalam Islam, di antaranya prinsip keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwah*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), musyawarah (*al-syūrā*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*).<sup>70</sup> Dalam unsur-unsur inilah Islam memiliki persamaan dengan konsepsi demokrasi ala Barat. Dengan kata lain, unsur-unsur ini merupakan landasan normatif-etis yang memiliki kesamaan dan nantinya menjadi kerangka bagi pelaksanaan demokrasi di dunia Islam.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip demokrasi tersebut memiliki sandaran normatif dalam Al-Qur'an, yaitu keadilan (*al-'adālah*), Q.S. al-Nisā' [4]: 58 dan 135, Q.S. al-Mā'idah [5]: 8; persamaan (*al-musāwah*), Q.S. al-Ḥujurāt [49]: 13; kemerdekaan (*al-ḥurriyyah*), Q.S. al-Baqarah [2]: 256, Q.S. al-Taubah [9]: 105, Q.S. Yūnus [10]: 99; musyawarah (*al-syūrā*), Q.S. Āli 'Imrān [3]: 159, Q.S. al-Syūrā [42]: 38; dan pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*), Q.S. al-Isrā' [17]: 34,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>68</sup>Mujiburrahman, "Pengantar Penerjemah: Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun", dalam Muhammad Abed al-Jabiri, *Syura: Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. viii.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 139-200.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 214; Anas Urbaningrum, *Islamo-Demokrasi*, hlm. 80-103.

Q.S. al-Aḥzāb [33]: 15.<sup>71</sup> Dari sisi inilah lantas sebagian intelektual Muslim memandang bahwa demokrasi kompatibel dan tidak bertentangan dengan Islam.

## 2. Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Perspektif Michel Foucault

Kemunculan sebuah karya tafsir tidak bisa dilepaskan dari setting historis yang melatarbelakanginya. Proposisi ini sesuai dengan pendapat Michel Foucault yang menyatakan bahwa dimensi sejarah dan filsafat (baca: kekuasaan dan pengetahuan) bersinggungan dan saling berinteraksi. Dalam pandangan Foucault, kekuasaan tidak hanya hadir di depan kita sebagai sebuah kekuatan. Kekuasaan juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, dan bahkan membentuk pengetahuan serta memproduksi wacana. Akhirnya, kekuasaan perlu disadari sebagai sebuah jaringan produktif yang bekerja di seluruh lembaga sosial, termasuk lembaga pengetahuan, lebih daripada sekadar sebuah instansi yang berfungsi represif.<sup>72</sup> Foucault menyimpulkan bahwa kebenaran (baca: pengetahuan) berhubungan dengan berbagai sistem kekuasaan yang memproduksi dan menopangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskannya, yang akhirnya membentuk sebuah rezim kebenaran (baca: rezim pengetahuan).<sup>73</sup>

Dalam melihat sebuah karya tafsir, perspektif pengetahuan dan kekuasaan yang ditawarkan Foucault bisa menjadi kerangka analisis. Artinya, kemunculan

<sup>71</sup>Anas Urbaningrum, *Islam-Demokrasi*, hlm. 80-103; Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi", hlm. 203-210; Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori (peny.), *Ahkamul Fuqoha*, hlm. 641.

<sup>72</sup>Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa (Yogyakarta: Benteng, 2002), hlm. 148.

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

sebuah karya tafsir tidak bisa dilepaskan dari jejaring kekuasaan sebagai salah satu bagian yang melatarbelakanginya.

### 3. Arah dan Gerak Tafsir Era Orde Baru dalam Perspektif Islah Gusmian

Dari segi hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan seperti yang digambarkan oleh Michel Foucault di atas, kiranya sangat menarik melihat telaah Islah Gusmian atas beberapa karya tafsir produk intelektual Muslim Indonesia periode 1990-an dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru saat itu. Secara umum, Islah Gusmian menegaskan bahwa tidak semua karya tafsir pada periode kekuasaan Orde Baru yang terkenal kuat dan otoriter ini mempunyai sensitivitas dan semangat perlawanan terhadap penguasa. Ada juga karya tafsir yang diam sama sekali, bahkan memuji penguasa Orde Baru.<sup>74</sup>

Selanjutnya, Islah Gusmian memetakan beberapa karya tafsir yang muncul pada era pemerintahan Orde Baru ke dalam tiga arah dan gerakan, yaitu yang melawan dan mengkritik pemerintah, yang bungkam, dan yang memuji. Arah dan gerakan tafsir yang beragam ini disebabkan oleh sikap yang berbeda-beda dalam menempatkan dan mendefinisikan pemerintah Orde Baru dalam wacana sebuah tafsir.<sup>75</sup> Dari beberapa karya tafsir yang menjadi fokus kajian Islah Gusmian, disimpulkan bahwa karya tafsir yang mengkritik dan melawan pemerintah Orde Baru adalah *Memasuki Makna Cinta* karya Abdurrasyid Ridha dan *Dalam Cahaya Al-Qur'an* karya Syu'bah Asa; karya tafsir yang bungkam adalah *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab dan *Ensiklopedi Al-Qur'an* karya M. Dawan

---

<sup>74</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir*, hlm. 317.

<sup>75</sup>*Ibid.*

Rahardjo; karya tafsir yang memuji adalah *Hidangan Ilahi* karya M. Quraish Shihab.<sup>76</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian yang dilakukan runtut dan sistematis, maka akan disajikan dalam sistematika sebagai berikut.

*Bab Pertama*, pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan rancang bangun dari keseluruhan penelitian yang menjadi pijakan dan pedoman penelitian.

*Bab Kedua*, berisi gambaran tentang sejarah demokrasi dan latar belakang *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI. Gambaran ini akan berguna untuk melihat evolusi konsep demokrasi dan untuk memotret sisi sejarah *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI.

*Bab Ketiga*, menjelaskan beberapa aspek dari *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, yaitu aktor intelektual di balik penulisan tafsir, metodologi penafsiran, dan contoh penafsiran. Penjelasan ini sangat penting sebagai pedoman untuk melihat penafsiran ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI selanjutnya.

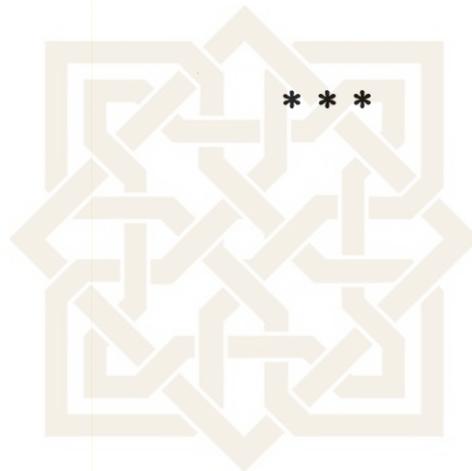
*Bab Keempat*, merupakan analisis atas penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 318-331.

demokrasi. Dengan menggunakan model analisis wacana, akan dilacak arah dan gerak tafsir serta konstruks wacana yang dibangun oleh Tim Departemen Agama RI dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya*.

*Bab Kelima*, penutup. Bab ini memaparkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah seperti dijelaskan dalam bab pendahuluan dan saran-saran konstruktif yang diperlukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya dan seiring dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni penelusuran prinsip-prinsip demokrasi dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, kesimpulan akhir dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Inti penafsiran *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI terhadap ayat-ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, Tafsir Depag mengartikan prinsip keadilan (*al-'adālah*) sebagai melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya, serta memberikan persaksian dengan jujur, semata-mata mengharap rida Allah, tidak memutarbalikkan fakta, tidak pandang bulu, dan sebagainya. *Kedua*, tentang makna prinsip persamaan (*al-musāwah*), Tafsir Depag mengungkapkan bahwa pada hakikatnya kedudukan semua manusia adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka, walaupun mereka dibedakan oleh beragam suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan sebagainya. *Ketiga*, Tafsir Depag mengartikan prinsip kebebasan (*al-ḥurriyyah*) ke dalam tiga makna, yaitu kebebasan bagi semua orang untuk memeluk suatu agama sesuai dengan yang dikehendakinya, kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia untuk beramal saleh dan berkarya dalam rangka memakmurkan bumi, serta kebebasan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk berbuat sekehendak hatinya. *Keempat*, Tafsir

Depag mengartikan prinsip musyawarah (*al-syūrā*), ke dalam dua kondisi.

(1) Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya bermusyawarah dalam segala urusan. Dan dalam melaksanakan keputusan musyawarah, bertawakallah kepada Allah. (2) Allah menganjurkan umat Islam supaya bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Sebab, dengan bermusyawarah, Allah akan menurunkan rahmat dan karunia-Nya. *Kelima*, Tafsir Depag mengartikan prinsip pertanggungjawaban (*al-mas'ūliyyah*) ke dalam dua makna, yaitu pertanggungjawaban dalam hal pemeliharaan harta anak yatim dan pertanggungjawaban dalam hal komitmen terhadap janji yang telah diucapkan. Dalam menafsirkan beberapa ayat tentang prinsip-prinsip demokrasi, Tafsir Depag hanya menggambarkan prinsip-prinsip tersebut secara umum. Tafsir Depag tidak pernah membahas prinsip-prinsip tersebut secara mendetail, terutama bagaimana kontekstualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

2. Di balik penyusunan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI ada relasi antara kekuasaan dan pengetahuan. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* sebagai produk pengetahuan yang dihasilkan oleh sebuah tim di bawah naungan Departemen Agama RI memiliki hubungan dengan pihak penguasa, yakni pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai penggagas disusunnya *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Relasi ini meniscayakan adanya pengaruh ataupun intervensi sehingga menghasilkan produk pengetahuan yang merepresentasikan rezim kebenaran. Pada

akhirnya, rezim kebenaran ini akan menghegemoni masyarakat yang membaca tafsir tersebut. Pengaruh kekuasaan dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* tampak pada gaya tafsir tersebut yang *text oriented*. Ketika menafsirkan Al-Qur'an, Tafsir Depag kurang mengakomodasi konteks ke-Indonesia-an tempat tafsir ini muncul sehingga Tafsir Depag terkesan me-“langit”. Tafsir Depag tidak berusaha melakukan pem-“bumi”-an atau kontekstualisasi makna ayat tersebut dengan situasi dan kondisi tempat Tafsir Depag muncul, yakni Indonesia.

3. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI adalah karya tafsir yang bersikap diam di tengah penindasan wacana terselubung yang dilakukan oleh penguasa ketika tafsir ini muncul. Arah dan gerak Tafsir Depag ini tidak berada dalam jalur kritisisme sehingga fungsi petunjuk Al-Qur'an tidak terakomodasi.

## B. Saran-saran

Setelah menelaah dan membahas *Al-Qur'an dan Tafsirnya* karya Tim Departemen Agama RI, kiranya penulis perlu mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari kajian penulis atas hal-hal tersebut di atas.

1. Hubungan antara wacana demokrasi dan Islam masih menyiratkan bayangan abu-abu penuh misteri. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa wacana demokrasi, lebih-lebih jika dilihat dari perspektif Islam, masih cukup menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penelitian terhadap wacana yang berembus dari Barat ini masih tetap dibutuhkan. Terlebih jika kajian

terhadap wacana ini dilakukan dari sudut pandang yang berbeda dan dari perspektif yang lebih luas.

2. Kajian terhadap *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang merupakan karya kolektif putra terbaik bangsa Indonesia ini masih banyak menyisakan sisi menarik. Kemeranian kajian tersebut tidak terbatas pada aspek kebahasaan ataupun penafsiran saja. Pada aspek wacana yang dikandung tafsir ini ataupun pada aspek hubungannya dengan kekuasaan—yang merupakan pihak penggagas ide penyusunan tafsir ini—juga masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu segera dicari jawabannya.
3. Sifat *Al-Qur'an dan Tafsirnya* yang terbuka dan selalu menerima ide-ide segar bagi pengembangan menyiratkan terbukanya peluang untuk penelitian-penelitian lanjutan. Pada akhirnya, penelitian-penelitian tersebut akan berguna sebagai pemantik ataupun amunisi bagi pengembangan dan penyempurnaan *Al-Qur'an dan Tafsirnya* berikutnya.

\* \* \*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Abidin, Ahmad Zainal. "Islam, Agama, dan Negara: Catatan atas Kebijakan Pemerintah Orba", dalam Jurnal *An-Nur*, Vol. 1, No. 2, Februari 2005.
- Abror, Indal. "Tafsir Al-Qur'an Versi Orde Baru", dalam Jurnal *ESENSIA*, Vol. 4, No. 1, Januari 2003.
- Ahmad, Khurshid. "Islam and Demokrasi: Some Conceptual and Contemporary Dimensions", dalam *The Muslim World*, Vol. 90, No. 1 & 2, Spring 2000.
- Anonim, "Al-Qur'an Sumber Inspirasi yang Tak Pernah Kering Sepanjang Zaman", dalam [www.hupelita.com](http://www.hupelita.com), 7 September 2008.
- \_\_\_\_\_. "K.H. Mukti Ali", dalam [www.pdat.com](http://www.pdat.com), 4 April 2008.
- \_\_\_\_\_. "Prof. DR. H. Abdul Mukti Ali (1923-2004): Cendekiawan Islam yang Pluralis", dalam [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com), 4 April 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asa, Syu'bah. *Dalam Cahaya Al-Qur'an: Tafsir Ayat-ayat Sosial-Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. t.tp.: t.p., t.th.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. Jakarta: Serambi, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2000.

- al-Bukhari, Imam. "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", dalam CD *Mausu'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*.
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, terj. A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I, II, IV, V, VII, IX. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf UII, 1991.
- al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, Jilid II. t.tp.: t.p., t.th.
- Effendy, Bachtiar. "Islam, Demokrasi, dan HAM: Problema Doktrin dan Implementasi", dalam Ahmad Suaedy (ed.). *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Qalam, 2003.
- al-Farmawi, Abd al-Hay. *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*, terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Federspiel, Howard M. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, terj. Tajul Arifin. Bandung: Mizan, 1996.
- Foucault, Michel. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santosa. Yogyakarta: Benteng, 2002.
- Ghafar, Afan. "Islam dan Demokrasi: Pengalaman Empirik yang Terbatas", dalam Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.

- Haekal, Muhammad Husain. *Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah. Bogor: Litera AntarNusa, 2005.
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Haydar, Hamid Hadji. "Filsafat Politik Imam Khomeini", dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam, al-Huda*, No. 4, Vol. II, Tahun 2001.
- Heryanto, Ariel. *Perlawanan dalam Kepatuhan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Hook, Sidney. "Democracy", dalam *Encyclopaedia Americana*, Volume 8. Danbury dan Connecticut: Grolier Incorporated, 1984.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, terj. Asril Marjohan. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 1995.
- al-Jabiri, Muhammad Abed. *Syura: Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Karim, M. Rusli. *Negara dan Peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan "Islam Politik" di Indonesia Era 1970-an dan 1980-an*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1996.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- \_\_\_\_\_. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Jakarta: Teraju, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Latif, Yudi, dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996.

- \_\_\_\_\_. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, 2005.
- Lewis, Bernard, et. al. *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- \_\_\_\_\_. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Madaniy, A. Malik. "Syura sebagai Elemen Penting Demokrasi", dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 36. No. I, Tahun 2002.
- Madjid, Nurcholish. "Beberapa Pemikiran ke Arah Investasi Demokrasi", dalam Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina, 2002.
- al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1990.
- Muhammad, Ahsin Sakho. "Beberapa Aspek Revisi Tafsir Departemen Agama", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. I, No. 3, 2006.
- Mujiburrahman. "Pengantar Penerjemah: Memadukan Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun", dalam Muhammad Abed al-Jabiri. *Syura: Tradisi, Partikularitas, dan Universalitas*, terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Muslim, Imam. "Ṣaḥīḥ Muslim", dalam CD *Mausu'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf*.
- Muslim, Muhammad. "Demokrasi", dalam John L. Esposito (ed.), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid I, terj. Eva Y.N., dkk. Bandung: Mizan, 2001.

- Mustaqim, Abdul. "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Profetika*, Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 2000.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam dan Demokrasi", dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1, Tahun 2002.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1997.
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qardhawy, Yusuf. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- al-Qattan, Manna'. *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*. t.tp.: Mansyūrāt al-'Aṣr al-Ḥadīṣ, t.th.
- Rais, M. Amien. "Kata Pengantar", dalam Abul A'la al-Maududi. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1993.
- Said, Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori (peny.). *Ahkamul Fuqoha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Keputusan Mukhtar, Munas, Mubes, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur bekerja sama dengan Penerbit Diantama, 2005.
- Setiawan, M. Nur Kholis. *Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian Al-Qur'an*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish. "Pengamatan Sekilas terhadap *Al-Qur'an dan Tafsirnya*", dalam M. Quraish Shihab. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soroush, Abdul Karim. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali. Bandung: Mizan, 2002.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Sulaiman, Sadek Jawad. "Demokrasi dan *Syūrā*", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Suryadilaga, M. Alfatih. "Islam dan Demokrasi: Studi atas Dasar Ideal, Pemikiran, dan Realitas-Empirik Islam", dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, Vol. 36, No. I, Tahun 2002.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- . "Revolusi Iran dan Imam Khomeini: *Wilayat al-Faqih* dan Demokrasi", dalam *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam, al-Huda*, No. 13, Vol. II, Tahun 2007.
- Tim Peduli Tapol Amnesty Internasional. *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam*, terj. Mohammad Thalib. Yogyakarta: Wihdah Press, 1998.
- Truna, Dody S. dan Ismatu Ropi (peny.). *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum, dan Pendidikan*. Jakarta: Logos, 2002.
- al-Turabi, Hasan. *Fikih Demokratis: dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terj. Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Mizan, 2003.
- Urbaningrum, Anas. *Islamo-Demokrasi: Pemikiran Nurcholish Madjid*. Jakarta: Katalis bekerja sama dengan Republika, 2004.

Wahid, Abdurrahman. "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi", dalam Masyhur Amin dan Muhammad Najib (ed.). *Agama, Demokrasi, dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LPSM, 1986.

Zainuddin, M. "Islam dan Demokrasi", dalam [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com), 5 April 2008.

\* \* \*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA